

## **“JAKFIN : Jakarta’s Financial Inclusion Synergy” Sebagai Solusi Pembiayaan di Sektor Riil dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta**

**Baghas Budi Wicaksono<sup>1</sup>, Yanti Pusparini<sup>2</sup>, Rini Kurnia Sari<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas Buddhi Dharma

<sup>1,3</sup>PJJ Manajemen, Binus Online, BINUS University

\*Email: [baghas.budi@ubd.ac.id](mailto:baghas.budi@ubd.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai indikator ekonomi moneter yang mempengaruhi JAKFIN sebagai solusi pembiayaan di sektor riil dan keuangan provinsi DKI Jakarta untuk mencapai keuangan inklusif dalam masyarakat akan memiliki dampak bagi indikator makroekonomi terhadap perkembangan pembiayaan dana pihak ketiga. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder melalui teknik pengolahan data statistika deskriptif dan inferensial yang diolah menggunakan software EViews. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh suku bunga, insentif fiskal, dan giro wajib minimum memiliki hasil bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang kurang signifikan (  $p\text{-value} > 0,05$  ) dan Tingkat inflasi, Insentif Fiskal , serta Giro wajib minimum memiliki pengaruh yang signifikan (  $p\text{-value} < 0.05$  ) dimana Giro wajib minimum berpengaruh secara negatif dan tingkat inflasi serta suku bunga berpengaruh secara positif terhadap peningkatan dana pihak ketiga. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar suku bunga dan menurunnya tingkat giro wajib minimum maka jumlah dana pihak ketiga yang diterima bertambah secara berturut-turut senilai 1.02 miliar dan 3.37 miliar. Maka, dari hasil persamaan (1) dan (2) menunjukkan hasil bahwa ketiga indikator tersebut berdampak terhadap perkembangan dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka rekomendasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah provinsi DKJ yang tepat yakni : (1) Menjadikan variabel bebas menjadi instrumen pengendali inflasi melalui metode inflation targeting, (2) Bank sentral yang melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKJ dan lembaga pemerintahan dalam menstabilkan indikator makroekonomi, (3) Pembentukan aturan yang berfokus kepada mewajibkan swasta untuk membiayai proyek pemerintah daerah dan juga pada pengawasan aliran dana, pembagian keuntungan, serta sistem pembayaran dalam skema kerjasama Pemerintah-Swasta, (4) Perlu adanya sinkronisasi peraturan pemerintah daerah agar terciptanya kepastian dalam pembiayaan investasi dalam proyek pemerintahan, (5) Peningkatan transparansi pelelangan proyek pembiayaan swasta agar tercegah perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme.

**Kata Kunci :** Keuangan inklusif; Ekonomi moneter; Makroekonomi; Dana pihak ketiga

### **1. Pendahuluan**

Keuangan inklusif adalah kondisi di mana setiap orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif ke layanan kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif berarti layanan

disampaikan dengan nyaman, bertanggung jawab, dan terjangkau bagi pelanggan serta berkelanjutan bagi penyedia layanan, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara finansial akan menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal. Keuangan inklusif sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di suatu kota, karena selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga berdampak positif bagi regulator, pemerintah, dan sektor swasta. Keuangan inklusif dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi praktik perbankan bayangan (*shadow banking*), mendukung pendalaman pasar keuangan, membuka potensi pasar baru bagi perbankan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan. Berdasarkan survei oleh LPS, jumlah masyarakat yang menabung di bank masih sangat rendah, dengan hanya 49% penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank. Hal ini bertolak belakang dengan tingkat akses masyarakat ke perbankan atau jasa keuangan yang mencapai 76,19%. Disparitas ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang literasi keuangan, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya tata kelola keuangan, terutama dalam hal kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi. Rendahnya pemahaman ini juga berdampak pada kurangnya kesadaran akan pentingnya tabungan, yang sebenarnya memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, peningkatan literasi keuangan menjadi solusi yang sangat penting. Tanpa literasi keuangan yang memadai, masyarakat rentan melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, yang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang manfaat dan risiko dari instrumen keuangan yang mereka pilih, memahami hak dan kewajiban, serta percaya bahwa produk dan layanan keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, program literasi keuangan perlu mencakup edukasi dan kampanye nasional, penguatan infrastruktur literasi

keuangan, serta pengembangan produk dan layanan keuangan yang terjangkau.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mempengaruhi determinan antara indikator ekonomi moneter seperti perkembangan dana pihak ketiga yang dipengaruhi oleh suku bunga, cadangan kas wajib (giro minimum), dan insentif fiskal oleh pemerintah.

terhadap perkembangan sektor keuangan yang diindikasikan pada variabel aset/aktiva. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi berupa studi literatur, tulisan ilmiah maupun artikel yang berkaitan dengan topik analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sektor keuangan di daerah khusus Jakarta (Sugihyanto, 2021).

### *Metode Pendekatan*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengolah data sekunder dari tahun 2010 hingga tahun 2022 melalui statistik deskriptif dan statistik inferensial. Adapun model yang digunakan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Afiyanti Triuspitorini et al., (2020, Fuadiyatu Zakki & Permatasari (2020), Muttaqiena (2013) dan Oktavianti & Nanda (2019) mengenai perkembangan dana pihak ketiga yakni sebagai berikut :

$$DPK_t = \beta_0 + \beta_1 Int_t + \beta_2 GWM_t + \beta_3 Fis_t + u_t \quad (1.)$$

$$DPK_t = \beta_0 + \beta_1 Inf_t + \beta_2 GWM_t + \beta_3 Fis_t + u_t \quad (2.)$$

Keterangan :

DPK : Jumlah dana pihak ketiga di sektor perbankan provinsi DKI  
(dalam miliar rupiah)

Int : Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (dalam persen)

Inf : Tingkat Inflasi (dalam persen)  
Fis : Insentif Fiskal melalui Pemprov DKJ untuk belanja modal sektor perbankan

#### Sumber Data

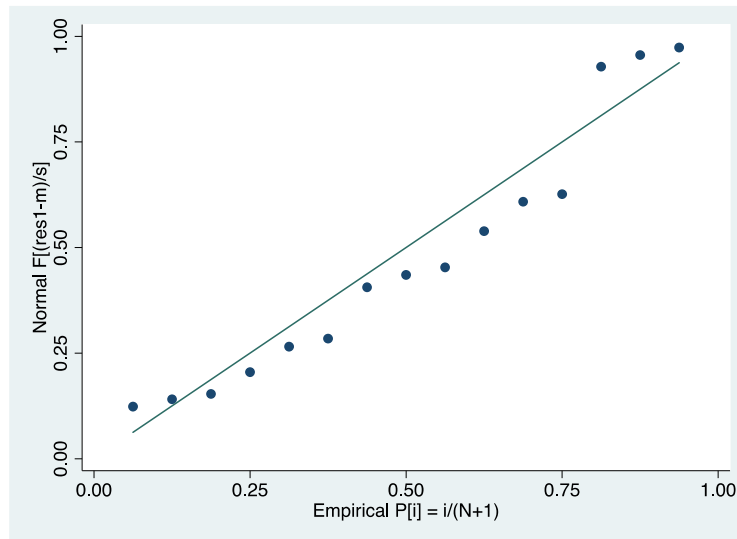
Data dalam penelitian ini diperoleh dari instansi pemerintah yang relevan yakni seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPB Kemenkeu RI) selama tahun 2006 hingga tahun 2020 dengan lingkup penelitian di sektor Keuangan Bank dan Bukan Bank di Daerah Khusus Jakarta. Peneliti menggunakan data sekunder dikarenakan beberapa alasan, yakni : (1) data sekunder lebih faktual dan akurat dalam menggambarkan pengaruh variabel yang diteliti, (2) data sekunder lebih mudah diperoleh secara daring, (3) data sekunder mengenai variabel yang diteliti sangat lengkap dan kredibel karena dirilis oleh instansi resmi pemerintah masing-masing (Inda & Rahma, 2018).

#### *Teknik Pengolahan Data*

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dengan empat variabel bebas yakni inflasi, suku bunga, insentif fiskal variabel terikat yaitu dana pihak ketiga. Regresi yang dilakukan dilengkapi dengan beberapa uji statistik sebagai berikut : (1) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji heteroskedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi, distribusi normal, (2) Uji Hipotesis secara parsial menggunakan uji-t dan simultan menggunakan uji-F (Affandi, 2018).

#### *Uji Distribusi Normal*

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber : Data diolah menggunakan STATA 14.1

#### Uji Normalitas menggunakan Grafik *Scatterplot*

Jika ditinjau berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa data pada model regresi memiliki tren linier disepanjang garis yang menjuntai. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi secara normal dan simetris (Fuadiyatu Zakki & Permatasari, 2020)

#### Uji Multikolinieritas

**Tabel 2.** Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF
Giro Wajib minimum	2.47
Suku bunga	2.73
Inflasi	1.38
Insentif Fiskal	1.21

Sumber : Data Diolah menggunakan STATA 14.1

#### Uji Multikolinieritas dengan metode *Variance Inflation Factor*

Berdasarkan uji multikolinieritas dengan metode VIF diatas, dapat diketahui bahwa dua variabel bebas terlepas dari masalah

heteroskedastisitas karena nilai VIF < 5. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel bebas yakni tenaga kerja, inflasi, suku bunga, dan dana pihak ketiga secara bersama-sama.

#### *Uji Heteroskedastisitas*

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>p-value</i>
Giro Wajib minimum	0.53
Suku bunga	0.13
Inflasi	0.69
Insentif Fiskal	0.16

Sumber : Data diolah menggunakan STATA 14.1

Berdasarkan uji heteroskedastisitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *p-value* dari variabel bebas > 0,05 yang menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain regresi penelitian ini bersifat homoskedastisitas yakni dalam model regresi tidak terjadi inkonsistensi varians dari berbagai residual (Nuha et al., 2016).

#### *Uji Autokorelasi*

Diketahui berdasarkan hasil *runtest* untuk uji autokorelasi yang bernilai 0.18 memiliki *p-value* diatas 0.05 yakni sebesar 1. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki korelasi antar *error term* atau residual pada antar periode t dengan periode t-1 (sebelumnya).

Adapun model penelitian yang sudah dirumuskan, dapat dianalisis dengan tabel hasil regresi dibawah ini :

Tabel 1. Persamaan Regresi

Variabel	Persamaan 1			Persamaan 2		
	Coefficient	t-statistic	p-value	Coefficient	t-statistic	Coefficient
C	9.5608	6.58	0.000			
INT	1.0239	11.81	0.000			
FIS	0.0298	0.63	0.544	0.1105	0.63	0.539
GWM	-0.4832	-1.36	0.201	-3.3786	-3.68	0.004
INF				0.0767	0.63	0.039
R-Squared		0.9711			0.6198	
F-statistic		123.3			5.96	
Prob (F-statistic)		0.000			0.0115	

Sumber : Data diolah menggunakan STATA 14.1

### 3. Pembahasan

#### *Pengaruh Suku Bunga, Insentif Fiskal, dan Giro Wajib Minimum terhadap Perkembangan Dana Pihak Ketiga di sektor Keuangan*

Berdasarkan hasil regresi diatas dapat diketahui bahwa suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga atas sektor keuangan di DKJ dengan koefisien regresi sebesar 1.0239. Artinya jika suku bunga memiliki peningkatan sebesar 1 % maka, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh lembaga keuangan bank dan non bank akan meningkat sebesar 1.0239 atau sebesar 1,02 miliar rupiah. Untuk Variabel insentif fiskal dan giro wajib minimum secara berturut-turut memiliki pengaruh positif, negatif, dan kurang signifikan, hal ini diindikasikan oleh *p-value* yang memiliki nilai lebih dari 0,05. Berdasarkan penetapan giro wajib minimum yang tinggi oleh bank sentral, Hal ini terjadi karena jika likuiditas sektor keuangan berkurang, maka masyarakat akan kesulitan untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Insentif Fiskal memiliki peran positif karena masyarakat akan dapat meningkatkan konsumsi dan

investasi apabila ada peningkatan pelayanan, infrastruktur yang dilakukan oleh sektor keuangan yang dimiliki oleh BUMD atau BUMN.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Cahyani (2018), Kusumaningtyas, (2012), Oktavianti & Nanda (2019), dan Sahara (2013) mengenai hal tersebut. Adapun pengaruh signifikan juga diindikasikan dari t-statistik sebesar 11.81 dengan  $p\text{-value} < 0,05$ .

#### *Pengaruh Tingkat Inflasi, Insentif Fiskal, dan Giro Wajib Minimum terhadap Perkembangan Dana Pihak Ketiga di sektor Keuangan*

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas diperoleh hasil regresi yang menunjukkan bahwa giro wajib minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga dengan koefisien sebesar -3.3786. Artinya jika variabel giro wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turun sebesar 1%, maka dana pihak ketiga akan meningkat sebesar 3.37 miliar rupiah. Hal ini didukung oleh fakta bahwa ketika giro wajib minimum acuan Bank Indonesia turun, masyarakat cenderung memiliki preferensi

untuk meningkatkan konsumsi dan melakukan pinjaman di sektor keuangan bank khususnya, pada saat yang sama potensi aset dana pihak ketiga akan dapat meningkat adanya karena penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kepada pengusaha atau sektor swasta. Pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini didukung fakta empiris bahwa inflasi yang meningkat menandakan peningkatan perputaran uang dan daya beli masyarakat dalam mengakses produk keuangan, maka dana pihak ketiga yang dikelola sektor keuangan bank dan non bank juga akan meningkat.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Malituf (2016), Mukhsinah (2019), Sugihyanto (2021) serta Kasmiarno & Mintaroem (2018) mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan dana pihak ketiga. Adapun pengaruh signifikan diketahui berdasarkan t-statistik variabel suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga yakni sebesar 3.68 dengan  $p\text{-value} < 0,05$ .



#### *Koefisien Determinasi ( $R^2$ )*

Berdasarkan hasil pengolahan data model regresi diatas, diketahui bahwa koefisien determinasi pada persamaan pertama dan kedua secara berturut-turut bernilai yang memiliki arti bahwa sebanyak 97% dan 61%. Adapun variasi perkembangan dana pihak ketiga dipengaruhi oleh variabel inflasi, suku bunga, insentif fiskal dan giro wajib minimum sebesar 97%, artinya sebanyak sisa 3% memiliki makna bahwa variabel dana pihak ketiga dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar model yang diteliti.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis indikator makroekonomi dalam menjawab JAKFIN sebagai solusi pembiayaan di sektor riil dan keuangan provinsi DKI Jakarta dalam mencapai keuangan inklusif adalah adanya pengaruh positif dan signifikan dari suku bunga terhadap perkembangan dana pihak ketiga atas sektor keuangan di DKJ. Setiap peningkatan suku bunga menyebabkan peningkatan dana pihak ketiga yang dihipunkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank. Sedangkan untuk giro wajib minimum memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga. Maka dari itu jika giro wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turun, akan terjadi peningkatan masukan dana pihak ketiga. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi dan melakukan pinjaman pada sektor keuangan ketika suku bunga turun.

Inflasi juga memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat. Peningkatan inflasi selaras dengan perputaran uang dan daya beli masyarakat dalam produk keuangan, maka hal ini dapat meningkatkan pembiayaan dana pihak ketiga yang dikelola sektor keuangan bank dan non bank. Dalam persamaan pertama dan kedua menunjukkan hasil bahwa perkembangan dana pihak ketiga benar dipengaruhi oleh variabel suku bunga, giro wajib minimum, dan inflasi. Suku bunga dan inflasi yang memberikan pengaruh positif, serta giro wajib minimum yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap peningkatan dana pihak ketiga yang masuk.

## 5. Rekomendasi Kebijakan

Sebagai rekomendasi yang didasarkan oleh hasil penelitian, agar pemerintah mampu menstabilkan indikator makroekonomi untuk meningkatkan dana pihak ketiga agar tercapainya solusi pembiayaan di sektor riil dan keuangan DKJ Adapun rekomendasinya :

1. Menjadikan giro wajib minimum, insentif fiskal, dan suku bunga menjadi instrumen pengendali inflasi dan jumlah uang yang beredar serta mempertahankannya sebagai instrumen moneter. Hal ini didasari dengan BI rate yang berdampak kepada suku bunga perkembangan pihak ketiga. Sehingga, Bank Indonesia memiliki otonomi sendiri setara dengan lembaga yang independen untuk mempertimbangkan pentingnya indikator makroekonomi menjadi salah satu instrumen moneter. Perubahan setiap indikator sendiri memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi dan ekonomi sebuah negara. Hal ini dikarenakan kenaikan suku bunga dapat menyebabkan terjadinya perlambatan pada pertumbuhan konsumsi serta dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit serta investasi juga akan melambat apabila BI rate meningkat dengan tinggi dalam waktu singkat. Dengan meningkatnya BI rate maka akan menyebabkan melemahnya mata uang Rupiah yang menghambat investasi dari pihak ketiga terhadap tujuan pembiayaan ekonomi di sektor riil dan keuangan.

Giro wajib minimum sendiri jika ditetapkan mengalami penurunan akan membuat masyarakat lebih memilih untuk memasukkan uang mereka ke dalam bank sehingga meningkatkan pemasukan dana pihak ketiga, apabila GWM meningkat akan berakibat menurunkan tingkat likuiditas dan melemahkan minat masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama mengalokasikan uang ke perbankan dan produk keuangan lainnya. Sebaliknya, insentif fiskal memberikan pengaruh positif dan signifikan kepada tingkat konsumsi masyarakat. Ketiga indikator tadi harus terjaga

stabilitasnya agar menciptakan tingkat inflasi yang dapat terus dikendalikan oleh lembaga Bank Indonesia. Maka dari itu, penting adanya lembaga seperti bank sentral yang dapat berfokus kepada pengelolaan indikator makroekonomi sebagai instrumen moneter tetap stabil.

2. Bank Indonesia yang melakukan kolaborasi dengan kementerian keuangan dan Otoritas Jasa keuangan yang bertujuan untuk menstabilkan indikator makroekonomi dan menciptakan keuangan inklusif dalam masyarakat. Pemerintahan pusat dan bank sentral diharapkan mampu bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan membentuk kebijakan yang dapat berjalan seimbang dan juga memastikan bahwa masyarakat tidak terjebak dalam produk keuangan yang tidak resmi sehingga membuat masyarakat kapok dan takut terhadap produk keuangan. Kestabilan tingkat konsumsi masyarakat berbarengan dengan harga barang konsumsi yang tetap terjaga stabilitasnya. Kestabilan inflasi yang terbentuk akan berdampak pada kestabilan investasi dan peningkatan dana pihak ketiga yang diterima. Masyarakat tetap terlindungi, sehingga tidak terjebak dalam produk keuangan yang tidak resmi dan yang menipu juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan pendanaan dari pihak ketiga.

Sebagai rekomendasi yang didasarkan oleh hasil penelitian, agar pihak swasta termotivasi untuk meningkatkan akses pembiayaan murah yang diadakan pemerintah sebagai solusi pembiayaan di sektor riil dan keuangan DKJ. Adapun rekomendasinya :

1. Perlu adanya pembentukan peraturan pemerintah DKJ yang mewajibkan swasta untuk membiayai proyek-proyek pengadaan infrastruktur dan barang murah. Peraturan yang dibuat berfokus kepada pembentukan kebijakan untuk mengawasi aliran dana kerjasama yang telah dilakukan dalam skema kerjasama pemerintah-swasta. Selain itu, perlu adanya peraturan yang mengatur jelas tentang pembagian hasil keuntungan dan juga sistem pembayaran yang baik terhadap pihak swasta. Hal ini diperlukan agar

terbentuknya rasa percaya pihak swasta kepada pemerintahan. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah DKJ yang lebih baik, pihak swasta yang awalnya tidak tertarik dengan proyek pemerintah karena kurang mempercayai menjadi lebih tertarik dengan proyek yang ditawarkan. Hal ini didasari dengan world bank yang menemukan 4,6% biaya informal dari total biaya yang dikeluarkan oleh pihak swasta terbentuk dari munculnya mark-up dari proyek infrastruktur dan sogok-menyogok pada saat tender suatu proyek infrastruktur berlangsung. Dengan adanya kebijakan dan regulasi skema kerjasama yang lebih tegas dan dapat meningkatkan kepercayaan pihak swasta dapat meningkatkan jumlah swasta yang bekerjasama dalam membiayai proyek-proyek strategis pemerintah daerah. Sehingga, pembiayaan proyek pemerintah daerah tidak hanya bersumber dari BUMN dan BUMD tetapi juga melalui pihak swasta.

2. Perlu adanya sinkronisasi aturan pemerintah daerah DKJ dalam mengatur kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta yang memberikan kepastian dalam pembiayaan investasi dalam proyek pemerintahan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dan spekulasi dari pihak swasta akan ketidakjujuran dan sikap tidak bertanggung jawab dari pihak pemerintah. Hal ini didasari dengan salah satu contoh kasus seperti PT Istana Karya ( Persero ) yang memiliki utang kepada 160 subkontraktor dan supplier dalam jangka waktu 10 tahun. Tunggakan utang kepada mitra Istaka Karya mencapai Rp 1,08 triliun. Dengan adanya fakta ini membuat pihak swasta memiliki kemungkinan untuk mundur di tengah jalan atau menolak untuk menyelesaikan infrastruktur yang telah dijanjikan dalam skema kerjasama pemerintah-swasta. Konsekuensi lebih besarnya adalah kemungkinan besar gagalnya proyek yang membuat APBD tidak termanfaatkan secara maksimal dan menjadikan DKJ tertinggal karena kemiskinan akibat korupsi. Maka dari itu, penting adanya aturan jelas yang dibentuk pemerintah daerah agar meningkatkan kepercayaan dan kualitas kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Adanya kepastian dalam kerjasama membuat

tujuan untuk mencapai keuangan inklusif akan lebih mudah diakses untuk masyarakat khususnya di sektor keuangan.

3. Pemerintah Daerah DKJ harus bersikap transparan terhadap lelang proyek pembiayaan yang dilaksanakan bagi swasta / investor swasta agar terbentuk kerja sama proyek tercegah dari potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rekomendasi ini didasari dengan banyaknya praktik persaingan pasar yang kurang sehat dalam pembagian proyek pembangunan kepada vendor swasta. Untuk menemukan kontraktor yang tepat dapat menggunakan sistem lelang yang melibatkan pertarungan antar vendor swasta untuk menawar paling rendah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, sehingga proyek yang dijalankan dapat menguntungkan pemerintah. Dengan diberlakukannya sistem yang transparansi proses lelang proyek pembangunan daerah akan memberikan solusi bagi pemerintah dalam mewujudkan penghematan, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Perlelangan dapat dilakukan secara terbuka dengan cara pengumuman proyek pembangunan melalui media massa, cetak ( koran ) ataupun online melalui website resmi pemerintah daerah. Calon kontraktor mulai dari pendaftaran, persyaratan, dan kelengkapan administrasi sampai pengumuman hasil pra kualifikasi perusahaan yang dinilai layak sebagai kontraktor dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi dalam pelelangan proyek pemerintahan maka dapat dibuktikan bahwa adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk berbuat jujur, adil dan bertanggung jawab sehingga dapat meyakinkan swasta bahwa tidak adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga telatnya pembayaran dari pemerintah kepada vendor. Oleh karena itu, pemerintah harus menunjukkan sikap yang bersih dan berwibawa agar sistem dapat berjalan semestinya. Pemerintah juga harus mengajak masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan secara ketat agar tercegahnya kemungkinan terjadi tindakan curang yang diakibatkan oleh mekanisme pasar dan persaingan tidak sehat.

## Referensi :

- Adam, L. (2014). *Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur* (L. Adam, Ed.; 1st ed., Vol. 1). LIPI Press.
- Affandi, F. (2018). *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-RATE dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2015*.
- Afiyanti Tripuspitorini, F., Akuntansi, J., & Negeri Bandung, P. (2020). Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 121-132. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.20228>
- Cahyadin, M. and Awirya, A.A. (2012) "Interaksi Antara Indikator Moneter dan Indikator Makroekonomi di Indonesia Tahun 2005 - 2010 ," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2), pp. 106-108.
- Cahyani, Y. T. (2018). *Iqtishadia Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap ROA (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2009-2016)*. 5(1).
- Fuadiyatu Zakki, N., & Permatasari, D. (2020). *The Effect Of BI Rate Interest, Equivalent Rate And Office Amount On The Collection Of Third Party Funds In Sharia General Banks (Study at Sharia Commercial Banks in Indonesia for 2014-2018)* (Vol. 5, Issue 2). <http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi>
- Inda, T., & Rahma, F. (2018). *Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia*.
- Kasmiarno, K., & Mintaroem, K. (2018). Analisis Pengaruh Indikator Ekonomi dan Kinerja Perbankan Syariah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Perbankan Syariah di Indoneisa Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Universitas Airlangga*.
- Kusumaningtyas, D. (2012). Pengaruh Inflasi, Suku BUnga, Nilai Tukar Valas dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia. In *AKRUAL* (Vol. 3, Issue 2). <http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akrl>
- Muliawati, N., & Maryati, T. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012. *Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Malituf, F. (2016). *Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya*.
- Mukhsinah, F. (2019). Analisa Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Universitas Gunadarma*.
- Musyaffi, A.M. et al. (2022) "Peningkatan Literasi Keuangan Digital Melalui Program Praktisi Mengajar."

- Muttaqiena, A. (2013). *Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Nuha, U., Setiawan, A., & Indriani, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 5(4), 1–11. <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/management>
- Oktavianti, E., & Nanda, S. (2019). Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 46–55.
- Putra, M.F.R. (2018) “Efektivitas Suku Bunga yang Rendah sebagai Stimulus Moneter di Indonesia,” pp. 3–7.
- Putri, N.A. and Lestari, D. (2019) “Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda di Jakarta,” *Research Paper*, 1(1), pp. 31–42.
- Sahara, A. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. In *Analisis Pengaruh Inflasi ... 149 Jurnal Ilmu Manajemen | (Vol. 1)*
- Sandi, F. (2023) “Terus Muncul Fenomena BUMN Karya Nunggak Bayar Utang Vendor,” *CNBC Indonesia*, 5 July.
- Sriwardiningsih, E. (2010) “Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi, dan Kebijakan Fiskal terhadap Investasi di Indonesia,” *Business Review*, 1(2), pp. 307–318.
- Sugihyanto, T. (2021). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Roa Dan Market Share Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*
- Wihandono, E .B. ( 2004 ). “Transparansi Lelang Proyek Sebagai Sarana Menuju Good Governance.